

SUARA PERDAMAIAN

Bersama • Bersaudara • Berbangsa

Edisi XXIX, Juli 2021



4 Kabar Utama
Menyerap Ibroh
dari Penyintas
dan Pelaku



6 Kabar Utama
Mendorong
Perdamaian
Lewat Pena



8 Wawancara dengan konselor Yayasan Pulih
Nirmala Ika Kusumaningrum
Bantuan Psikologis Korban
Tak Terbatas Waktu



Para korban terorisme yang hadir dalam FGD (dari kiri ke kanan): Meisy Sabardiah (korban Bom Thamrin 2014), Nanda Olivia Daniel, Sucipto Hari Wibowo (korban Bom Kuningan 2004), R. Supriyo Laksono (korban Bom Bali 2002), dan Mulyono (korban Bom Kuningan 2004).

Legal Clinic

Pemenuhan Hak Korban Pasca-PP 35/2020

Tiga tahun sudah UU Anti-Terrorisme berlaku sejak disahkan 22 Juni 2018. Tanggal yang sama di tahun ini menjadi batas akhir bagi korban terorisme masa lalu untuk dapat mengajukan permohonan kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020. Implementasi pemenuhan hak konstitusional para korban mesti terus dikawal.

Gagasan tersebut melatari diselenggarakannya diskusi kelompok terfokus (FGD) Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Terorisme Pasca-PP No. 35 Tahun 2020. Acara daring ini diselenggarakan oleh AIDA pada Senin (28/6) lalu.

Pada kesempatan tersebut Sucipto Hari Wibowo, korban Bom Kuningan 2004 yang juga Ketua Yayasan Penyintas Indonesai (YPI), menyampaikan pengalamannya membantu sesama korban untuk mendapatkan perlindungan negara. Ia mengatakan, pemenuhan hak korban terorisme masih dirasa belum maksimal. Berbagai beleid yang mengatur hak korban terorisme, mulai dari UU No. 31/2014, UU No. 5/2018, hingga PP No. 35/2020 yang mengatur pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu, menurutnya belum diimplementasikan secara optimal oleh negara.

Ia mencontohkan, layanan bantuan medis, psikososial dan psikologis kepada korban terorisme yang menurut UU No. 31/2014 tidak ada masa tenggatnya. Namun, pada praktiknya korban kesulitan mengakses layanan karena adanya keterbatasan.

Sucipto juga mengatakan bahwa pihaknya selaku perkumpulan korban terorisme telah bersurat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan data korban lama yang diberikan kompensasi tahap kedua,

namun belum direspons. "Jadi tujuan mendapatkan data tersebut adalah kita ingin melihat mana saja teman-teman yang sudah diproses maupun yang belum. Dan, kenapa dengan yang belum? Mereka selalu bertanya-tanya kepastian itu. Itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang belum mendapatkan kompensasi," ujarnya.

R. Supriyo Laksono, korban Bom Bali 2002, turut berudat rasa. Senada dengan Sucipto, ia menilai performa kehadiran negara untuk korban terorisme belum optimal. Dia menyampaikan harapan dari para korban di Bali terkait kelanjutan layanan atau bantuan ke depannya. Meski sudah mendapatkan kompensasi dari negara, korban berharap ada program bimbingan dalam hal pengelolaan.

Selain itu Sony juga menyampaikan tentang adanya korban Bom Bali yang baru terdeteksi, sehingga untuk mengurus segala syarat administrasinya sudah terlambat. Hal ini tentu menjadi kasus baru yang harus dicarikan solusinya demi tercapainya perlindungan korban terorisme secara adil dan menyeluruh.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli LPSK, Rianto Wicaksono, memaparkan data korban terorisme yang sudah dan sedang dilayani. Menurut catatan LPSK, terdapat 575 korban terorisme yang sudah mengajukan kompensasi hingga 20 Juni 2021, di mana 227 masuk dalam pemberian kompensasi Gelombang I dan 348 korban masuk dalam Gelombang II.



Kompensasi Gelombang I sudah diserahkan kepada 215 korban pada 16 Desember 2020, sedangkan untuk Gelombang II sedang dilakukan proses penelaahan data. Terkait dengan korban yang terpisah dari organisasi, sehingga baru mendapatkan informasi dan terlambat untuk mengajukan permohonan kompensasi, Rianto mengatakan bahwa pihaknya sedang mendiskusikan isu tersebut dengan pihak terkait guna mengajukan perpanjangan tenggat waktu. Dalam hal ini, sinergitas antarlembaga baik dengan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), organisasi korban, maupun pihak lain sangat dibutuhkan untuk merealisasikan usulan itu.

Merespons tentang pembatasan masa layanan medis, psikososial dan psikologis, Rianto menerangkan, LPSK mengacu pada data rekam medik korban dari RS atau psikolog. LPSK mempertimbangkan perpanjangan layanan jika memang data mendukung keperluan tersebut. Wabil khusus mengenai aspirasi para korban terorisme di Bali, ia menjelaskan, korban bisa mengajukan bantuan pendampingan keberlangsungan usaha, dan LPSK juga menerima masukan dari para korban mengenai bentuk bantuan psikososial yang dibutuhkan.

Kepala Seksi Pemulihan Korban Direktorat Perlindungan BNPT, Muhammad Luthfi, menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan LPSK dan

“Kita tidak bisa membiarkan ratusan orang haknya terabaikan. Sesuai dengan UU No. 5 tahun 2018 dan Resolusi PBB yang mengatakan tidak boleh ada satu pun korban terorisme yang terabaikan hak-haknya.”

kementerian/lembaga terkait untuk memecah masalah korban yang terlambat mengajukan kompensasi. Ia mengatakan, seringkali anggaran dan pembatasan di masa pandemik menjadi hambatan program. “Ke depan BNPT berkomitmen untuk kembali bersinergi dengan para korban,” ungkapnya.

Imam Subandi, perwakilan dari Densus 88 dalam FGD berharap agar tidak ada lagi korban yang tercecer atau luput dari pendataan. “Sudah seharusnya lembaga dan masyarakat saling bersinergi untuk membantu mengidentifikasi korban, termasuk mengajukan korban yang belum teridentifikasi jika ada yang terlibat,” katanya.

Nanda Olivia Daniel, korban Bom Kuningan 2004, menyampaikan temuannya terkait dengan perjuangan korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan hak-

haknya. Ada beberapa masalah yang menyebabkan korban belum mendapatkan kompensasi serta hak-hak lainnya. Di antaranya adalah kesalahan penulisan nama serta kesulitan mendapatkan penetapan sebagai ahli waris korban yang telah meninggal. Meisy Sabardiah, korban Bom Thamrin 2016, turut mengusulkan agar para korban benar-benar dibantu secara psikososial. Karena menurutnya dana kompensasi bisa habis dengan cepat, sedangkan pelatihan dan pendidikan bisa berlangsung lama. Di akhir acara, Direktur Eksekutif AIDA, Riri Kharirah, menyampaikan bahwa sinergitas antarlembaga menjadi sangat penting dalam memenuhi hak-hak korban sesuai PP 35/2020. Khususnya mengenai data, pihaknya mendorong adanya keterbukaan sehingga dapat diakses secara langsung dan mudah oleh para korban. “Kita tidak bisa membiarkan ratusan orang haknya terabaikan. Sesuai dengan UU No. 5 tahun 2018 dan Resolusi PBB yang mengatakan tidak boleh ada satu pun korban terorisme yang terabaikan hak-haknya,” ucapnya. [FL]

Salam Redaksi

Pembaca yang budiman, salam damai! *Suara Perdamaian* Edisi XXIX telah terbit, melaporkan berbagai kegiatan kampanye perdamaian secara daring yang melibatkan penyintas dan mantan pelaku terorisme dalam rentang April-Juli 2021.

Laporan kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD) Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Terorisme Pasca-PP No. 35 Tahun 2020 disajikan terdepan dalam keluaran ini. Hadir dalam FGD sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga, paguyuban penyintas terorisme, serta organisasi masyarakat sipil yang concern dengan isu ini.

Sebuah tulisan karya Yuni Arsih (korban Bom Kuningan 2004) yang menggambarkan perjuangannya melampaui berbagai tantangan hidup, dimuat di halaman ketiga.

Suguhan berikutnya adalah laporan safari kampanye perdamaian AIDA di tujuh kampus di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Di tiap-tiap kampus diselenggarakan acara Diskusi & Bedah Buku La Tay`as: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya yang dikelola oleh para mahasiswa alumni kegiatan AIDA. Safari kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Seminar Sehari: Halaqah Perdamaian, Belajar dari Kisah Korban dan Mantan Pelaku Terorisme serta Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Mahasiswa yang diadakan sebelumnya.

Edisi XXIX turut memuat laporan *Short Course* Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme yang diikuti 49 wartawan dari 40 media massa lokal dan nasional di wilayah Sulawesi.

Wawancara redaksi dengan konselor Yayasan Pulih, Nirmala Ika Kusumaningrum, tentang serba-serbi pendampingan psikologis korban terorisme memungkasi *Suara Perdamaian*.

Terakhir, redaksi mengajak kepada pembaca sekalian untuk disiplin menjaga kesehatan diri serta selalu mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Salam damai, salam sehat!

Suara Perdamaian diterbitkan oleh Yayasan Aliansi Indonesia Damai (AIDA). **Pelindung:** Buya Syafii Maarif. **Dewan Redaksi Senior:** Imam Prasodjo, Farha Abdul Kadir Assegaf, Solahudin, Max Boon. **Penanggung Jawab:** Hasibullah Satrawi, Riri Kharirah. **Pemimpin Redaksi:** Muhammad El Maghfurroddi. **Redaktur:** Akhwani Subkhi, M. Syafiq, Septika WD, Fikri, Ahmad Hifni, Fahmi Suhudi, M. Saiful Haq, Linda Astri DW, Faruq AH, Wiwit Tri R. **Sekretaris Redaksi:** Intan Ryzki Dewi. **Layout:** Akhmad Saefullah, Serly Firisma Praselin, Muhammad Rivaldi, Muhammad Yanwarh Rhaman. **Editor:** Laode Arham. **Distribusi:** Lida Hawiwika, Nurul Rachmawati, Erni Kreshnawati.

Redaksi menerima tulisan dari teman-teman korban bom terorisme secara sukarela. Tulisan yang diterima akan diedit dan disesuaikan oleh redaksi, tanpa mengubah substansi yang ada.

Tulisan atau kritik, saran, dan keinginan untuk menerima *newsletter* ini secara berkala dapat dikirim ke sekretariat@aida.or.id. Telp: 021 7803590 atau 0812 1935 1485 atau 0878 7505 0666. Fax: 021 7806820

Bangkit Bersama Buah Hati

Nama saya Yuni Arsih, kelahiran Jakarta, 24 Juni 1978. Saya adalah istri korban Bom Kedutaan Australia, Kuningan Jakarta, alm. Suryadi. Saya ingin berbagi cerita tentang kejadian yang menimpa suami saya dan kehidupan saya membesarkan anak kami.

Tahun 1997 saya bekerja di sebuah perusahaan retail. Di sana saya awal berjumpa dan kenal dengan suami. Kami menikah tahun 1998. Setelah menikah cobaan datang, kami kena PHK karena ada krisis moneter dan kerusuhan di Jakarta. Kami berdua *nganggur*, saya sedang hamil.

Tahun 1999 lahirlah anak kami, putra yang kami beri nama Febri Renaldi. Kami sangat bahagia sekali walaupun suami belum dapat kerjaan yang tetap. Apa *aja* dikerjakan suami saya demi *nyari* nafkah biar bisa makan dan beli susu untuk anak. Tahun 2001 alhamdulillah suami saya dapat panggilan bekerja di PT. ARLA, dan ditugaskan di Kedutaan Besar Australia Jakarta. Walaupun bekerja sebagai tukang kebun, saya bersyukur sekali akhirnya suami bisa bekerja tetap.

Alhamdulillah kehidupan kami mulai berubah, tidak numpang makan lagi sama mertua. Kalau setiap bulannya suami selalu *nyenengin* anak jalan-jalan bareng atau makan bareng di luar. Meskipun pas-pasan tapi suami saya selalu *bahagiain* saya dan anak.

Firasat

Tahun 2004 Kamis pagi seperti biasa saya sibuk di dapur. Suami siap-siap, tiba-tiba anak saya Febri *nanngis meluk* ayahnya, *nggak* boleh berangkat kerja. Anak saya tetap *megangin* ayahnya, *nggak* boleh jalan, *nanngis* *nggak* henti-henti. Suami saya *ngelus-elus* kepalanya sambil berpesan. "Jangan bandel, rajin sekolah, jagain Mama, jangan cengeng!" Itu yang diucapkan suami saya. Akhirnya pelan-pelan mau juga lepas dari ayahnya. Saya *anter* anak saya sekolah, waktu itu usia 5 tahun, baru TK.

Habis *nganter* Febri sekolah saya lari cepat-cepat biar bisa *nyiapin* bekal suami. Sampai di rumah *ngos-ngosan*, ternyata dia sudah jalan. Saya cek bekal buat kerja dibawa, alhamdulillah. Menurut cerita, suami sempat gendong keponakannya, ketemu di jalan, dan *diompolin*. Tapi entah kenapa *nggak* balik ganti baju lagi ke rumah. Karena sudah berangkat, saya berinisiatif beres-beres rumah, tiba-tiba aja kok *pengen* banget beres-beres rumah.

Selesai beres-beres saya *rebahan* sambil *nyalain* TV. Spontan kaget waktu itu terasa jantung berhenti, pikiran ke mana-mana. Pas saya *nyalain* TV langsung siaran kejadian bom di Kuningan Jakarta, depan Kedutaan Australia. Saya gemeteran, langsung keluar *nyari* wartel karena *nggak* punya HP, suami *doang* yang punya.

Saya lari ke wartel, pengen tahu cepet-cepet. Saya telepon *nggak* diangkat-angkat. Karena beritanya di TV banyak yang sudah tahu, tetangga semua pada ngumpul, menanyakan kabar suami saya yang kerja di sana.

Suami sedang bekerja di Kedutaan, masuk pagi sekitar jam 10.00 tanggal 9 September 2004, *gantian* dengan temannya. Ledakan bomnya itu pas banget di depan gerbang taman, tempat suami saya kerja. Saya mendapat informasi kejadian bom dari TV dan ditelepon oleh pihak Kedutaan. Setelah tahu kabar suami meninggal, saya langsung *ngedrop*, *nanngis*, sedih, campur aduk semua, tubuh terasa lemas.

Saya dan anak saya menangis, air mata tiada henti-hentinya. Suami saya, ayah dari anak saya, berangkat keadaan sehat untuk mencari nafkah, pulang membawa nama. Kondisinya waktu itu anak saya masih sangat kecil. *Gimana* caranya saya harus membesarkan anak saya tanpa seorang ayah?

Adik ipar saya langsung mencari jenazah almarhum di lokasi. Awalnya ke RS MMC, ternyata sudah tidak ada di sana. Menurut cerita, almarhum di RS MMC masih bernafas. Karena situasi waktu itu banyak korban bergelatakan, akhirnya suami saya tidak tertolong. RS MMC sudah padat dengan korban bom akhirnya suami saya dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, dan di sana ternyata sudah tidak bernyawa.

Almarhum dibawa pulang pukul 20.00 WIB. Keluarga memutuskan langsung bawa pulang tanpa autopsi, *nggak* mau dibersihkan di sana, dan dimandikan juga tetap dalam kondisi yang apa adanya saat kejadian. Jasad suami utuh tapi penuh luka bakar dan serpihan material bom. Di dada kanan kiri terdapat bekas lubang akibat tertancap gerbang Kedutaan. Darah bercucuran terus, banyak darah di sekujur tubuhnya, ada luka di kepala. Almarhum dimakamkan keesokan harinya. Tangisan semua keluarga saat itu pecah, merasakan duka yang paling dalam.

Berjuang untuk bangkit

Anak saya menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya meninggal, dan dia lihat sendiri ledakan bomnya lewat TV. Sikapnya jadi berubah, jadi mudah emosi, cepat marah, dan *nggak* mau belajar, *nggak* mau sekolah.

Tapi saya sebagai ibu sekaligus ayah, berusaha terus supaya anak saya menjadi yang terbaik. Saya juga *nggak* mau terpuruk terus. Saya harus bangkit bersama anak saya, demi masa depan anak saya. Setiap hari saya berusaha menyemangati supaya mau belajar dan sekolah. Saya bersyukur anak saya tahap demi tahap bisa lulus SD, SMP, SMK dan akhirnya bisa kuliah sampai saat ini di UMJ Jakarta. Saya juga selalu *ngasih* arahan ke anak saya, biar menjadi anak yang baik. Jangan punya sifat pendendam, jangan ada kekerasan, dan selalu memaafkan kepada siapa pun. Harus semangat terus dan bangkit untuk menciptakan perdamaian, dan menjadi generasi yang kuat juga berbakti sama orang tua.

Saya bersyukur anak saya sudah bisa menjadi anak yang baik, kuliah sambil dagang. Sudah cari uang sendiri. Saya bangga dia sudah bisa menjadi pengganti ayahnya, sudah bisa *ngasih* saya uang untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari. Karena dia tahu dari dulu saya bekerja dan bekerja terus untuk mencari nafkah pengganti ayahnya. Sekarang saya bahagia dan bersyukur anak saya sudah bisa mencari nafkah sendiri dan membahagiakan saya, ibunya.

Yuni Arsih
Penyintas Bom
Kuningan 2004

Dok. AIDA

Menyerap Ibroh dari Penyintas dan Pelaku



Para aktivis mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di wilayah Purwokerto dan sekitarnya yang terlibat aktif dalam safari Diskusi & Bedah Buku *La Tay`as: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya*.

Aktivis mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di wilayah Purwokerto dan sekitarnya membuat gerakan nyata untuk menyuburkan perdamaian di kampus masing-masing sepanjang April hingga Mei lalu. Mereka menggelar acara daring Diskusi & Bedah Buku *La Tay`as: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya*.

Acara di 7 kampus tersebut merupakan tindak lanjut dari dua kegiatan sebelumnya, yaitu Seminar Sehari: Halaqah Perdamaian, Belajar dari Kisah Korban dan Mantan Pelaku Terorisme serta Pelatihan Pembangunan Perdamaian di Kalangan Mahasiswa. Para aktivis alumni dari dua kegiatan tersebut menyebarluaskan pembelajaran berharga atau ibroh dari kisah korban dan mantan pelaku terorisme kepada jaringannya sesama mahasiswa.

Mereka bersinergi dengan berbagai pihak, baik unsur mahasiswa maupun civitas akademika di kampus masing-masing, guna menyukseskan penyelenggaraan Diskusi & Bedah Buku *La Tay`as*.

Di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, mereka mengupayakan langkah terbaik agar acara berlangsung lancar dengan dukungan dari AIDA.

Buku *La Tay`as: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya* ditulis oleh cendekiawan muslim alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Hasibullah Satrawi, dari hasil pengalamannya dalam membantu dan mendampingi sebagian penyintas

aksi teror, serta sebagian orang yang bertobat dari jalan ekstremisme. Sesuai judulnya, *La Tay`as* (jangan putus asa), buku ini mengisahkan nilai-nilai ketangguhan yang dimiliki oleh penyintas serta mantan pelaku. Dalam pelaksanaan Diskusi & Bedah Buku *La Tay`as* bersama mahasiswa IAIN Purwokerto, Selasa (13/4), Direktur Eksekutif AIDA, Riri Khariroh, mengatakan bahwa mahasiswa adalah kelompok yang rentan terpapar ideologi ekstrem. "Generasi muda menjadi sasaran dan korban aksi ini. Kita harus berhati-hati dalam bergaul, berteman,

"Bagi saya, korban adalah orang pilihan, karena tidak semua orang bisa berada di titik pemaafan setelah penderitaan yang dialaminya."

dan mengikuti pengajian, apalagi generasi muda melekat erat dengan teknologi dan media sosial," ujarnya. Sementara itu, dalam gelaran Diskusi & Bedah Buku *La Tay`as* bersama mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), Kamis (20/5), Wakil Rektor III, Tata Sambada, S.T., mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam melestarikan perdamaian di Indonesia. Salah satu upayanya bisa

ditempuh dengan cara meningkatkan literasi melalui kisah korban dan mantan teroris. "Kita tingkatkan kemampuan literasi dari orang-orang yang lebih berpengalaman ini, sehingga kita dapat informasi dan ilmu dari orang yang valid tanpa tujuan tendensi kelompok tertentu," ungkapnya.

Alfina Khoirinnisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) alumni Pelatihan AIDA, menyampaikan testimoni dalam Diskusi & Bedah Buku *La Tay`as* yang digelar Selasa (27/4). Dari pembacaannya terhadap buku *La Tay`as*, ia mengaku mampu menggali banyak ibroh. Dari penyintas aksi teror, misalnya, ia memahami bahwa cacat fisik atau trauma psikis yang ditimbulkan dari aksi teror

berlangsung sangat lama, bahkan sepanjang hayat. Meskipun dihadapkan pada penderitaan seberat itu, penyintas mampu menunjukkan sikap moral yang amat luhur, yaitu memaafkan mantan pelaku. "Bagi saya, korban adalah orang pilihan, karena tidak semua orang bisa berada di titik pemaafan setelah penderitaan yang dialaminya," katanya.

Hal senada diungkapkan Zahro Al Iftah

Assahadati, mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* pada Jumat (23/4). Di dalam buku tersebut, kata dia, terdapat banyak kisah inspiratif seputar perjumpaan penulis dengan korban bom dan pelaku teror yang bertobat. Korban dan mantan pelaku saling mengisi bahkan berkolaborasi untuk menggemakan perdamaian di Indonesia.

Puluhan hingga ratusan mahasiswa peserta Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* di setiap kampus membanjiri kolom obrolan dalam forum dengan pertanyaan atau gagasan yang terkait dengan ibroh dari kehidupan korban dan mantan pelaku. Seorang mahasiswi dalam gelaran Diskusi & Bedah Buku di

grup yang ingin menggulingkan Indonesia,” katanya.

Setelah mengikuti Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* mahasiswa diharapkan mampu mengambil ibroh dari ketangguhan penyintas dan pertobatan mantan pelaku. “Saya masih punya keluarga, orang tua, saudara-saudara. Saya juga punya banyak impian. Makanya, saya tidak boleh menyerah dengan rasa trauma itu. Rasa optimisme dan perjuangan untuk menggapai cita-cita menjadi modal saya untuk melawan rasa trauma.” Demikian Sudirman A. Talib - penyintas aksi teror bom di Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta Selatan pada 2004- berbagi semangat ketangguhan saat menjadi narasumber dalam Diskusi & Bedah Buku bersama mahasiswa UMP. Pesan ketangguhan lainnya disampaikan oleh I Wayan Suidiana, korban Bom Bali 2002, dalam kesempatan Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* dengan mahasiswa Unsoed. Istrinya, mendiang Widayati, menjadi korban jiwa dalam tragedi Bom Bali. Kini, setelah belasan tahun peristiwa itu berlalu, ia mengaku tak ingin sedikit pun menyimpan dendam kepada pelakunya. “Saya sudah memaafkan, baik pelaku yang sudah dieksekusi maupun yang sudah keluar penjara dan bertobat. Saya memaafkan setulus hati yang paling

terjadi lagi ke depannya,” ujarnya dalam Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* bersama mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu (UPB), Jumat (16/4).

Sebagian peserta menyampaikan kesan dan pesan setelah menyimak penuturan narasumber dalam Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as*. Salah seorang mahasiswa dari IAIN Purwokerto menyampaikan bahwa kisah korban dan mantan pelaku menjadi penguat untuk menyebarkan narasi perdamaian di lingkungan kampus. Mahasiswa IIQ An Nur mengajak rekan-rekannya untuk aktif mewujudkan perdamaian. “Mari kita mendorong kalangan mahasiswa untuk selalu menggalakkan perdamaian, dengan salah satu caranya yaitu menghargai dan menghormati perbedaan,” katanya.

Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya* dikelola oleh aktivis mahasiswa di 7 kampus, yaitu IIQ An Nur; IAIN Purwokerto; UPB; UNU Purwokerto; Unsoed; UMP; dan ITTP. Di setiap kampus, acara diikuti puluhan hingga ratusan mahasiswa lintas fakultas dan program studi. Secara keseluruhan mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan sebanyak 1018 orang. Narasumber dari unsur korban yang dihadirkan adalah Ni Luh Ernati, I Wayan Suidiana (korban Bom Bali 2002), Mulyono, Sudirman A. Talib, Nanda Olivia Daniel, Josuwa Ramos (korban Bom Kuningan 2004), dan Susi Afitriyani (korban Bom Kampung Melayu 2017). Sementara itu, dari unsur mantan pelaku yang dihadirkan ialah Ali Fauzi, Mukhtar Khairi, Kurnia Widodo, Choirul Ihwan, dan Iswanto. [AH, WR]



▶ Ali Fauzi (mantan pelaku terorisme), Ni Luh Ernati (korban bom Bali 2002), Sudirman A. Talib (penyintas bom Kuningan2004).

UMP menanyakan, seperti apa ciri orang yang sudah terpapar paham terorisme.

Menanggapi hal itu, mantan pelaku terorisme yang telah bertobat, Ali Fauzi, menekankan bahwa untuk menakar seseorang terpapar ideologi kekerasan tidak dapat dilihat dari penampilan fisik atau atribut yang dikenakan. “Namun, ketika dibedah secara *fikrah* (pemikiran-red), maka akan terlihat berbeda. Kita bisa mengetahui ciri-ciri teroris dari pemikirannya,” ujarnya.

Peneliti di Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin, dalam kesempatan Diskusi & Bedah Buku dengan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Senin (19/4), menerangkan bahwa di antara gejala yang menunjukkan seseorang terpapar paham ekstrem adalah enggan menjawab salam. Dalam Islam, menjawab salam dari sesama muslim hukumnya wajib, namun masalahnya, bagi kelompok ekstrem orang yang di luar kelompoknya dianggap tidak jelas keislamannya atau bahkan dinilai kafir, bukan bagian dari Islam.

Ali Fauzi mengajak mahasiswa untuk waspada terhadap propaganda kelompok teroris. “Jangan kita berpandangan, ini rekayasa, ini pengalihan isu, ini operasi intelijen! Bukan. Jangan ada yang berasumsi macam-macam! Semuanya dilakukan oleh grup-

dalam,” kata Wayan. Semangat kebangkitan yang kurang lebih sama juga dibagikan oleh Mulyono, penyintas Bom Kuningan 2004, kepada peserta Diskusi & Bedah Buku di kampus Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) An Nur Yogyakarta, Sabtu (3/4). Ia mengaku kuat melampaui titik terendah dalam hidupnya dengan menanamkan nilai-nilai agama. “Saya banyak belajar dari Al-Quran. Allah tidak akan membebani kita kecuali atas kemampuan kita. Sampai detik ini, saya berpegang kepada pesan Al-Quran ini,” ungkapnya.

Penulis buku *La Tay'as*, Hasibullah, menekankan kepada para mahasiswa peserta Diskusi agar menjadikan kesaksian penyintas dan mantan pelaku sebagai teks pertama atau buku babon dari segala keilmuan yang dipelajari. Pasanya, ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan manusia sedemikian rupa mestinya bertujuan untuk mencegah timbulnya korban atau pun pelaku. Oleh sebab itu, ia mengharapkan mahasiswa menjadikan pengalaman korban dan mantan pelaku sebagai basis gerakan untuk terus melestarikan perdamaian di negeri tercinta.

“Bagi korban, terorisme adalah takdir. Tapi bagi kita, apa yang disampaikan oleh korban dan mantan pelaku harus menjadi penggerak kita untuk berbuat sesuatu, untuk mencegah kekerasan agar tidak

	www.aida.or.id
	sekretariat@aida.or.id
	(+62 21) 7803590 +62 878 7505 0666
	+62 812 1935 1485
	AIDA - Aliansi Indonesia Damai
	@suara_aida
	@suara_aida
	Aliansi Indonesia Damai

DATA FORM KORBAN

Bagi teman-teman korban yang belum pernah atau ingin mengisi Data Form Korban, silakan menghubungi AIDA di 0812 1935 1485 & 0878 7505 0666 atau sekretariat@aida.or.id, dengan mencantumkan nama lengkap, alamat tinggal, nomor kontak, dan email (jika ada). Staf AIDA akan mengirim Data Form lewat pos atau email.

Mendorong Perdamaian Lewat Pena

Liputan media tentang isu terorisme perlu didorong agar menyuburkan nilai perdamaian. Demikian pesan yang mengemuka dalam *Short Course Daring Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme*, akhir Mei lalu. Kegiatan 3 hari tersebut diikuti 49 wartawan dari 40 media massa nasional dan lokal di wilayah Sulawesi.

Media selama ini dirasa cenderung menitikberatkan pemberitaan pada lingkup pelaku dan jaringannya, serta aspek penanganan hukum. Perspektif korban masih jarang diangkat. Pakar ilmu komunikasi, Hanif Suranto, dalam kegiatan menerangkan bahwa perspektif korban potensial untuk dikembangkan menjadi narasi kontraterorisme dan perdamaian. Ia juga menekankan agar jurnalis memahami secara mendalam tujuan peliputan. "Tidak hanya melaporkan fakta tapi juga harus berpikir jauh, untuk apa fakta itu dilaporkan," ujarnya. Lebih lanjut Hanif mengingatkan bahwa jurnalis punya peran vital antara menjadi bagian dari upaya kontraterorisme atau justru penyampai pesan pelaku. "Jangan sampai, karena alasan jurnalis harus objektif maka dengan polosnya kita mengabarkan bagaimana aksi teror terjadi, menampilkan kengerian bagaimana pelaku meledakkan bom, menggelorakan heroisme teroris, atau menyorot korban yang sedang kesakitan," katanya.

Selaras dengan itu, anggota Dewan Pers, Agus Sudiby, berpesan agar juru warta menempatkan jurnalisme bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai nilai yang lebih tinggi, yaitu kemanusiaan atau kemaslahatan publik. "Kita sebagai pers yang sudah ada selama 20 tahun harus lebih dewasa, harus mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap korban dan masyarakat luas," ucapnya. Dalam kegiatan turut dihadirkan penyintas aksi teror

"Kita sebagai pers yang sudah ada selama 20 tahun harus lebih dewasa, harus mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap korban dan masyarakat luas."

bom serta mantan pelaku terorisme yang telah bertobat. Ali Fauzi Manzi, mantan anggota sekaligus petinggi kelompok teroris di Jawa Timur, membeberkan sepaik terangnya dahulu di dalam gerakan kekerasan. Ia membenarkan bahwa di antara standar keberhasilan aksi teror kelompok lamanya adalah liputan media yang masif dan berskala luas. Sebab, dengan begitu tujuan mereka menyebarkan ketakutan di masyarakat menjadi tercapai. Namun, itu potret Ali Fauzi di masa lalu. Dia telah mengalami pergolakan batin yang panjang hingga bisa mengevaluasi pemikiran. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlibatan saya dalam jaringan teroris yang banyak mendatangkan mudarat atau bahaya, baik untuk individu, negara, dan agama kita. Wabil khusus kepada saudara saya, Mbak Yunik, yang jadi korban di depan Kedutaan Besar Australia," katanya.

Gayung bersambut, Yunik, penyintas aksi teror bom di Kedutaan Australia di kawasan Kuningan Jakarta pada 2004, merespons permintaan maaf Ali Fauzi. "Segala sesuatu yang sudah terjadi adalah takdir dari Allah yang harus saya terima dengan ikhlas dan rasa syukur. Kita harus bangkit dan menatap masa depan yang lebih cerah," tuturnya. Yunik terluka di bagian tangan serta mengalami trauma sangat lama akibat ledakan Bom Kuningan. Menurut Ali Fauzi, salah satu pelaku Bom Kuningan adalah muridnya di jaringan terorisme.

Dari kesaksian korban dan mantan pelaku terorisme, diharapkan insan media lebih aktif berkontribusi terhadap pembangunan perdamaian. Peneliti kajian terorisme di Universitas Indonesia, Solahudin, menyebut salah satu faktor yang menghambat pencegahan terorisme di Indonesia adalah kepercayaan sebagian masyarakat bahwa terorisme adalah konspirasi elit. Menurutnya, jurnalis dapat membantu meluruskan pandangan seperti itu.



► Agus Sudiby (anggota Dewan Pers) dan Hanif Suranto (Pakar ilmu komunikasi)

Ketua Pengurus AIDA, Hasibullah Satrawi, mendorong peserta *Short Course Daring* agar semakin menggencarkan liputan berperspektif korban dalam isu terorisme. Dalam pandangannya, liputan berperspektif korban bukan berarti menampilkan korban sebagai narasumber. Dia menggambarkan dalam diagram lingkaran, liputan yang berperspektif korban setidaknya mencakup tiga lapisan. Pertama, di lapisan paling kecil ada korban langsung. Liputan media harus bisa mendorong pemenuhan hak korban oleh negara sesuai UU No. 5/2018, yaitu rehabilitasi medis, psikososial dan psikologis, serta kompensasi.

Di lapisan kedua, liputan media harus bisa melindungi korban tidak langsung dari aksi terorisme yang terjadi. Yaitu, keluarga dari korban langsung. "Misalnya, korban bom meninggal dunia, anaknya masih sekolah, nah bagaimana biaya pendidikan dan nafkah hidup anak ini, teman-teman juga penting mendorong isu semacam ini," kata Hasibullah. Lapisan ketiga, lanjutnya, adalah masyarakat secara umum. Jurnalis berperan penting untuk melindungi masyarakat agar di masa depan tidak menjadi korban atau menjadi pelaku. "Bagaimana caranya? Sadarkan mereka dengan liputan kita bahwa terorisme itu real, bukan rekayasa, dampaknya juga sangat nyata, korbannya sangat menderita, pelakunya juga menderita," ujarnya. Sebagian peserta mengaku mendapatkan perspektif baru yang mengubah pola pikir dalam menyajikan berita. "Sebelumnya saya terlalu mengikuti fakta-fakta di lapangan tentang bagaimana berita itu berdarah-darah biar laku dijual. Dengan pelatihan ini, mengubah saya bahwa membuat berita bukan hanya berdasarkan fakta, tapi harus bijak merasakan korban," kata Lilis Riluwis, wartawan Radio Komunitas Mosintuwu.

Peserta lain mengharapkan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia dipercepat, sehingga perdamaian masyarakat semakin terjamin. "Video-video yang menampilkan kengerian dari perspektif pemirsa pasti sangat tidak nyaman. Negara harus didorong untuk segera menuntaskan terorisme di wilayah Poso dan sekitarnya, karena operasi demi operasi berlanjut terus dari Maleo, Tinombala, lanjut terus, masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan aman," ujar Yoanes Litha, jurnalis VOA Indonesia. [FAH]

DONASI AIDA

Untuk program perdamaian dan kemanusiaan, AIDA menerima donasi secara tidak mengikat dari semua pihak yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Silakan salurkan donasi Anda melalui alamat rekening berikut:

Nama : Yayasan Aliansi Indonesia Damai
 No. Rekening : 0701745272
 Swift Code : BBBIDJA
 Alamat : Permata Bank cabang Sudirman
 Jl. Jendral Sudirman kav 29-31, Jakarta 12920



► Suasana acara diskusi daring kelompok terfokus (FGD) Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Terorisme Pasca-PP No. 35 Tahun 2020, Senin (28/6).



► Potret suasana acara Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* bersama mahasiswa IAIN Purwokerto, Selasa (13/4).



► Suasana acara gelaran Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* bersama mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), Kamis (20/5).



► Para peserta menyimak penuturan narasumber dalam Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* bersama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Selasa (27/4).



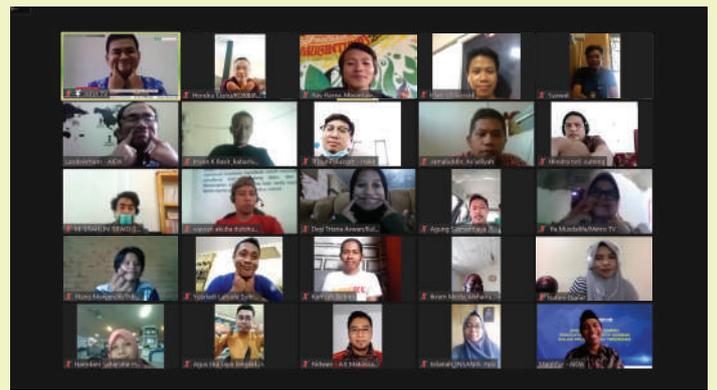
► Potret bersama mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam gelaran Diskusi & Bedah Buku, Jumat (23/4).



► Suasana acara diskusi & Bedah Buku dengan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Senin (19/4).



► Potret suasana Diskusi & Bedah Buku *La Tay'as* bersama dengan mahasiswa IIQ An Nur Yogyakarta, Sabtu (3/4).



► Para jurnalis peserta *Short Course* Daring Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Isu Terorisme berfoto bersama usai kegiatan, Kamis (27/5).

Bantuan Psikologis Korban Tak Terbatas Waktu

Korban terorisme mengalami trauma psikologis dengan kadar yang beragam. Sebagian korban seketika terganggu kondisi kejiwaannya secara ekstrem akibat aksi teror, namun yang lain bisa jadi tiga bulan, setahun, atau bahkan bertahun-tahun setelah kejadian baru merasakan penderitaan psikologis. Akses layanan rehabilitasi psikologis bagi korban terorisme oleh sebab itu semestinya tak dibatasi waktu. *Suara Perdamaian* mewawancarai konselor Yayasan Pulih, Nirmala Ika Kusumaningrum, M.Psi., Psikolog, yang telah berpengalaman melakukan pendampingan psikologis korban terorisme, untuk membahas topik tersebut. Berikut petikannya:

Apa saja tantangan yang dihadapi konselor dalam menangani korban terorisme selama ini?

Dulu, sebelum para korban membentuk komunitas, kita agak kesulitan harus mengumpulkan datanya. Sekarang sudah ada komunitasnya jadi ketika mau mengadakan sesi konseling lebih mudah. Tantangannya, tidak banyak orang di Indonesia *aware* masalah psikologis atau kesehatan mental, termasuk korban. Banyak yang merasa dirinya baik-baik saja, dan ketika kami datang memberikan pendampingan mereka merasa tidak memerlukan itu. Tidak jarang juga kami mengalami penolakan. Mungkin memang ada yang tidak memerlukan, tapi bisa jadi ada yang memerlukan tapi belum menyadari. Biasanya, kami meninggalkan nomor telepon, barangkali mereka butuh bantuan. Selain itu, biasanya mereka cenderung lebih percaya kepada orang-orang terdekat atau mungkin tokoh agama, dan kami juga tidak memaksa untuk konseling dengan kami. Oleh karena itu kami juga mengadakan psikoedukasi untuk keluarga agar jika terjadi situasi yang tidak diinginkan mereka bisa mencari bantuan.

Trauma yang dialami korban bom tentu berbeda dengan korban peristiwa lainnya. Bagaimana konselor membantu mereka survive dari penderitaan mentalnya?

Yang pertama adalah normalisasi. Banyak korban biasanya *nggak* paham dengan reaksi *shock* mereka sendiri. Ada yang mungkin merasa, "Wah, saya gila, nih! Ada apa dengan saya? Kok saya *denget* suara keras *dikit aja* takut? Kok tengah malam saya sering terbangun dan mimpi buruk?" Nah, biasanya setelah kejadian kami tidak melakukan pendampingan yang langsung membuat mereka untuk bisa berjalan maju, karena mereka juga mungkin masih sibuk dengan luka fisiknya. Yang bisa kita lakukan ketika awal masuk, ya normalisasi dan psikoedukasi tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dalam psikoedukasi itu kita berikan teknik-teknik atau *tools* sederhana untuk menangani situasi trauma. Kita mulai dari edukasi mengenai trauma, gejala dan dampaknya, baik dampak secara fisik maupun kognitif, juga dampaknya untuk anak-anak atau keluarganya yang lain. Dengan demikian, mereka akan lebih *aware* dan tahu cara mengatasinya. Kita juga kasih tahu kalau ada serangan panik, di mana mereka bisa mencari bantuan. Nah, setelah itu baru kita lakukan konseling lebih dalam, apakah masih ada ketakutan, trauma, atau bisa jadi sampai PTSD juga. Itu yang kemudian kita proses lebih lanjut. Normalisasi dan konseling yang kita lakukan, sasarannya bukan hanya korban langsung, melainkan juga keluarganya, karena keluarga juga harus bisa menjadi *support-system*. Kita kasih *tools* untuk penguatan, dan kadang juga melibatkan pendekatan secara spiritual.

Menurut konselor, apa atau sejauh mana urgensi pendampingan psikologis terhadap korban terorisme?

Penting, karena reaksi korban terhadap peristiwa bom yang dialami tentu berbeda-beda. Ada yang memang setelah kejadian cepat bangkit dan bisa melanjutkan hidup, namun ada pula yang menyimpan trauma, ketakutan atau kemarahan dalam waktu yang cukup lama. Biasanya korban bom cenderung mengalami luka fisik yang cukup parah, yang pada akhirnya

membuat mereka kehilangan pekerjaan dan tidak bisa kembali beraktivitas seperti semula. Hal ini tentu berpengaruh pada psikologis mereka dalam memandang sesuatu ke depan. Nah, pendampingan ini berfungsi untuk bisa membantu mereka *move on*, untuk kembali melanjutkan kehidupan dengan kondisi yang sudah dialami.

Apa harapan konselor terhadap program rehabilitasi psikologis korban bom yang dilakukan pemerintah?

Tentunya kami tidak berharap akan ada bom lagi, ya. Tapi kalau harapan terkait program pemerintah, ya minimal aksesnya harus jelas dan mudah. Korban berhak, mau menggunakan layanan ini atau tidak, tapi alur dan aksesnya harus jelas. Biasanya korban memang cenderung ada luka fisik, tapi pemerintah harus meng-*cover* bukan hanya bantuan untuk luka fisik saja, melainkan juga menyeluruh dengan psikologisnya. Bantuan psikologis ini juga semestinya harus bisa diakses kapan saja karena pada korban biasanya ada *delayed response*, saat kejadian mereka belum merasa ada dampak psikologisnya. Bisa saja sebulan, setahun, atau tahun-tahun berikutnya baru merasakan. Inilah kompleksnya dampak psikologis. Kalau luka fisik, saat kejadian bisa langsung kelihatan dan mendapatkan penanganan segera, dan bisa kelihatan juga sembuh, sedangkan psikologis tidak bisa. Setelah kejadian, mungkin saja korban terlihat seperti biasa, bisa kerja, bisa kembali ceria, dan reaksi baru dia akan rasakan beberapa bulan atau tahun selanjutnya. Jangan sampai waktu dia butuh, justru layanan psikologis itu ternyata sudah berhenti atau tidak bisa diakses, kan repot juga. Jadi akan susah kalau pendampingan psikologis dikasih batas waktu. Karena susah dikasih batas waktu, maka setidaknya pemerintah juga harus memberikan psikoedukasi. Ini sangat penting bukan hanya untuk korban langsung melainkan juga untuk keluarganya. Karena bisa jadi justru keluarga dan kerabatnya yang dampak psikologisnya lebih besar, lebih *shock*, lebih *nggak* bisa terima, *kaya gitu*. [LADW]

